

**KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM
SECARA CUMA-CUMA KEPADA MASYARAKAT YANG TIDAK
MAMPU BERDASARKAN PASAL 37 UUJN DI KOTA PADANG**

TESIS

***Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan***



OLEH :

FELTI NOVIRA

NIM : 2320122017

Dosen Pembimbing :

Dr. M. Hasbi, S.H., M.H

Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU BERDASARKAN PASAL 37 UUJN DI KOTA PADANG

Felti Novira, 2320122017, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2025

ABSTRAK

Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan layanan hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tergolong tidak mampu. Namun, ketentuan ini masih menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dari notaris dalam menentukan bentuk jasa hukum apa saja yang bisa diberikan secara cuma-cuma tersebut, apakah hanya sebatas konsultasi atau bahkan jasa dalam pembuatan akta. Hal ini disebabkan karena dalam bagian penjelasan pasal tersebut, Undang-Undang hanya mencantumkan frasa "cukup jelas" tanpa uraian lebih lanjut. Akibatnya, muncul pertanyaan mengenai bentuk layanan hukum seperti apa yang dimaksud, serta bagaimana kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai tidak mampu. Dengan mempertimbangkan uraian di atas, permasalahan yang dapat dikaji dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana Konsep tentang "pemberian jasa hukum secara cuma-cuma" dan "orang yang tidak mampu" sebagai wujud tanggungjawab notaris dalam melakukan tugas dan kewenangannya, 2) Bagaimana Implementasi aturan tentang pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normative-empiris. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data meliputi wawancara dan analisis dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Teori kewenangan, teori kepastian hukum, dan teori efektivitas hukum digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian penulis, pelaksanaan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) ditafsirkan secara mandiri oleh masing-masing notaris. Bentuk jasa hukum yang dapat diberikan secara gratis oleh notaris mencakup penyuluhan atau konsultasi hukum serta pembuatan akta yang tidak dipungut biaya. Adapun kriteria masyarakat tidak mampu yang dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN merujuk pada individu yang secara ekonomi tergolong kurang mampu, yang dapat diketahui melalui jenis pekerjaannya dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan setempat. 15 orang sampel dari populasi notaris di Kota Padang telah melaksanakan kewajiban mereka untuk memberikan layanan hukum secara cuma-cuma dalam lingkup kenotariatan, meskipun pelaksanaannya berbeda-beda. Layanan ini diberikan dengan memberikan konsultasi dan juga pembuatan akta-akta yang bersifat sosial serta akta-akta umum.

Kata Kunci: kewajiban, notaris, jasa hukum, cuma-cuma, orang tidak mampu

**NOTARY'S OBLIGATION TO PROVIDE FREE LEGAL SERVICES TO
UNABLE PEOPLE BASED ON ARTICLE 37 OF THE
UUJN IN PADANG CITY**

*Felti Novira, 2320122017, Notary Study Program, Faculty of Law, Andalas
University, Year 2025*

ABSTRACT

According to Article 37 of the UUJN, notaries are obligated to offer free legal services in the notarial field to those who are economically disadvantaged. Nonetheless, this leads to interpretation and confusion, as the UUJN itself only states it quite clearly in the explanation section of Article 37 UUJN. This creates confusion regarding what type of legal services in the notarial field this law refers to. And what are the criteria for identifying those who are underprivileged? The issue of the vague definition of underprivileged individuals and free legal services in notarial practice poses a risk to notaries fulfilling their responsibilities. According to the description above, the issues that can be raised in this thesis are: 1) How is the concept of "providing free legal services" and "underprivileged people" as a form of notary responsibility in carrying out their duties and authorities, 2) How is the implementation of the rules regarding the provision of free legal services to underprivileged people in Padang City. This research employs an empirical juridical approach. The sources of data utilized comprise both primary and secondary data. Interviews and document studies were used as data collection techniques. Data were subjected to qualitative analysis. The theory of authority, the theory of legal certainty, and the theory of legal effectiveness serve as the analytical framework for this research. According to the findings of the author's study on free legal services as outlined in Article 37 of the UUJN, this article specifies that each notary can offer certain legal services at no cost. These services include legal counseling or consultation and the creation of deeds without charge by the notary. Concerning the criteria for individuals who are unable, as outlined in Article 37 paragraph (1) of the UUJN, specifically those who lack economic resources, this can be assessed based on a person's occupation and corroborated by a Certificate of Inability from the Local Village. Notaries in Padang City have fulfilled their responsibilities to offer pro bono legal services within the notarial domain, albeit at varying degrees. These complimentary legal services include legal consultations as well as the creation of social and general deeds.

Keywords: *obligations, notary, legal services, free, poor people*